



**PENGARUH PDRB, KESEHATAN, DAN KRIMINALITAS TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 2015-2019**

Amin Isnanto¹⁾

KPP Pratama Purbalingga

Istiqomah²⁾

Suharno³⁾

^{2), 3)} Universitas Jenderal Soedirman

Alamat Korespondensi: amin.isnanto@kemenkeu.go.id, istiqomah@unsoed.ac.id,
suharno@unsoed.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[17 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[13 12 2022]

KATA KUNCI:
kesehatan, kriminalitas, pajak penghasilan, PDRB

KLASIFIKASI JEL:
H30

ABSTRACT

The largest revenue comes from taxes, that are managed in state spending for development and government administration. One type of central tax is income tax with the object of adding wealth. The purpose of this study is to analyze the effect of GRDP of the primary sector, GRDP of the secondary sector, GRDP of the tertiary sector, crime, and health on income tax revenue in 2015-2019. The object of research is 35 districts/cities in Central Java Province which are analyzed using panel data. Based on the results of the study, it was found that the GRDP of the primary sector has a negative and significant effect on income tax. GRDP of the secondary sector and GRDP of the tertiary sector have a significant positive effect on income tax. Crime and health have no significant effect on income tax. GRDP affects income taxes because economic behavior (production, consumption, saving, and investment) generates income that is tax payable.

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, perolehan pajak yang terkumpul dikelola dalam belanja negara untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan terhadap pajak penghasilan 2015-2019. Objek penelitian adalah 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisis menggunakan regresi data panel.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PDRB sektor primer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. PDRB sektor sekunder dan PDRB sektor tersier berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Kriminalitas dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan. PDRB memberikan pengaruh terhadap pajak penghasilan karena perilaku ekonomi (produksi, konsumsi, menabung, dan investasi) menghasilkan penghasilan yang terutang pajak.

1. PENDAHULUAN

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pajak memberikan porsi besar dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Susunan

APBN terdiri pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Komposisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan mengikuti program pembangunan pada masanya. Susunan APBN Indonesia berikut:

Tabel 1. Susunan APBN Indonesia Tahun 2016-2019 (dalam milyar)

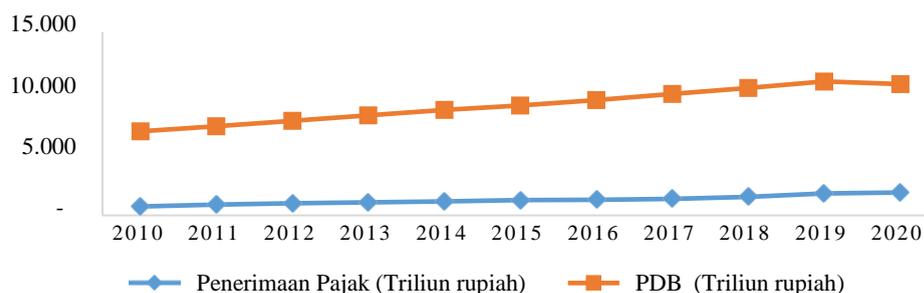
No	Uraian	2016	2017	2018	2019
A.	Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1
	I. Pendapatan Dalam Negeri	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
	1. Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3
	II. Penerimaan Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4
B.	Belanja Negara	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.461,1
	I. Belanja Pemerintah Pusat	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3
	II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	710,3	742,0	763,6	826,8
C.	Keseimbangan Primer	(126,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)
D.	Surplus/Defisit	(308,3)	(341,0)	(314,2)	(296,0)
E.	Pembiayaan	334,5	366,6	314,2	296,0

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019: 11)

Tabel 1. menunjukkan bahwa setiap tahun belanja negara selalu lebih besar dibanding pendapatan negara, sehingga APBN dalam kondisi

defisit dan diperlukan pembiayaan. Selanjutnya perbandingan PDB dan penerimaan pajak secara nasional sebagai berikut:

Gambar 1. Penerimaan Pajak dan PDB Indonesia Tahun 2010-2020

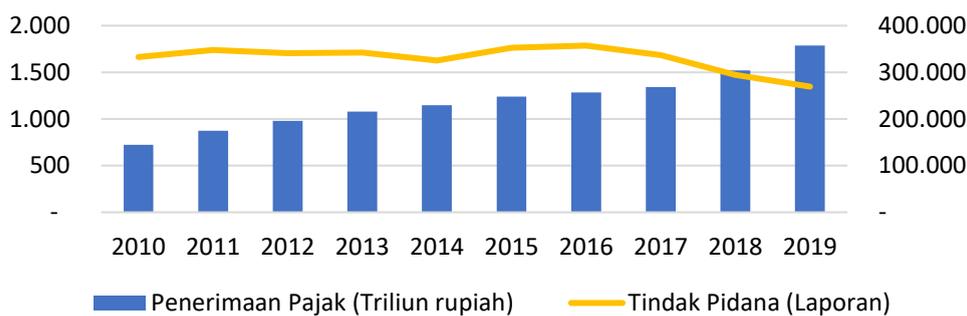


Sumber: Kemenkeu RI dan BPS RI (2020)

Pada Gambar 1. dapat dilihat laju pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penerimaan pajak, pola menunjukkan adanya tren yang sama. Menurut Mispianiti dan Kristanti (2018) PDRB berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pahala dan Muslih (2020), karena semakin tinggi tingkat konsumsi dan

perekonomian masyarakat maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak. Hal tersebut karena semakin besar PDRB suatu daerah akan meningkatkan berbagai sektor ekonomi, sehingga kemampuan sektor industri akan semakin meningkat sehingga potensi semakin besar pajaknya. Persandingan antara penerimaan pajak dan jumlah tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian disajikan pada Gambar 2. Sebagai berikut:

Gambar 2. Penerimaan Pajak dan Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan Kepada Kepolisian Resort di Indonesia Tahun 2010-2019



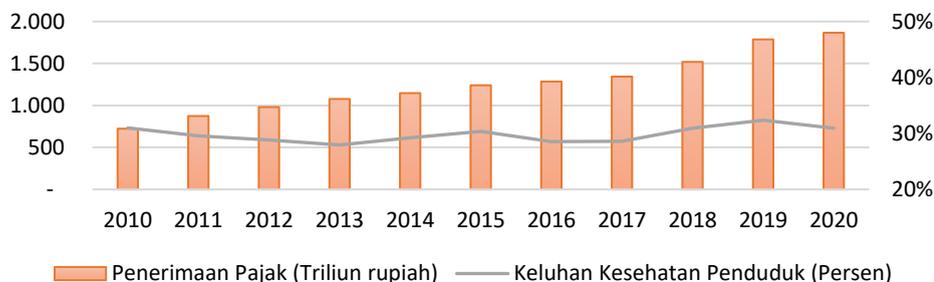
Sumber: BPS RI dan Kemenkeu RI

Pada Gambar 2. di atas dapat dilihat persandingan antara penerimaan pajak dan tidak pidana yang dilaporkan kepada pihak kepolisian di Indonesia. Dalam laporan *Global Peace Index 2018* oleh *Institute for Economics & Peace (2018:74)* disebutkan ketika perdamaian meningkat, ekonomi yang lebih kuat memberikan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi. Penelitian oleh Saputro dan Meirinaldi (2021) menyebutkan bahwa stabilitas keamanan berpengaruh terhadap stabilitas makroekonomi melalui peningkatan pertumbuhan industri mampu memberikan dampak peningkatan stabilitas makroekonomi. Sedangkan perubahan kebijakan dan kondisi makroekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak sesuai

penelitian Harahap et al. (2018).

Subagyo dan Melliza (2020) menemukan bahwa keamanan lingkungan yang dirasakan masyarakat atas resiko-resiko yang ada, memberikan pengaruh kepada kepuasan wajib pajak, kemudian kepuasan wajib pajak tersebut diikuti dengan pembayaran pajak. Penelitian-penelitian di atas menjelaskan adanya pengaruh tindak kejahatan, pidana, dan melawan hukum terhadap penerimaan pajak. Data tentang penerimaan pajak dan presentase keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk Indonesia disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Penerimaan Pajak dan Persentase Keluhan Kesehatan Penduduk Indonesia Tahun 2010-2020



Sumber: Kemenkeu RI dan BPS RI (2021)

Dari Gambar 3. dapat dilihat tren penurunan persentase keluhan kesehatan yang dialami penduduk Indonesia dan pertumbuhan penerimaan perpajakan. Pinto et al (2019) menyebutkan bahwa penyakit dan beban ekonomi yang terkait dengan merokok tinggi di Brasil dan kenaikan pajak mampu mencegah kematian, penyakit, dan biaya bagi masyarakat. Pichon-Riviere et al. (2020) menjelaskan keadaan terbebas dari kejadian kardiovaskular, stroke, dan kanker akan mengurangi biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan pendapatan pajak. Kesehatan kerja memberikan pengaruh yang sifatnya positif dan akan menyebabkan peningkatan kinerja karyawan (Kartikasari & Swasto, 2017). Menurut Putra & Prasetya (2018) kesehatan berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. Penelitian Oktiani et al. (2019) menjelaskan bahwa kinerja karyawan dan produktifitas kerja memiliki hubungan yang kuat. Dengan tingkat produktifitas yang tinggi, tentunya diikuti dengan peningkatan pendapatan atau penambahan kemampuan ekonomi karyawan yang selanjutnya berdampak meningkatnya pembayaran pajak penghasilan.

Ridha dan Parwanto (2020) menyebutkan bahwa pembangunan manusia yang salah satunya diindikasikan dari kesehatan yang lebih baik, berpengaruh positif dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Bandiyono & Hazmi (2016) indeks kesehatan

memberikan korelasi terhadap *tax ratio* masing-masing negara, dikarenakan meningkatnya usia harapan hidup. Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah (2019: 794) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (2020:3), diketahui terdapat gap antara realisasi pajak Provinsi Jawa Tengah (rangking 5 secara nasional) sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menempati rangking 4 secara nasional.

Produk Domestik Bruto memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak; namun belum diteliti lebih lanjut terhadap turunan PDB sektor ekonomi primer, sekunder, atau tersier. Kondisi keamanan memberikan jaminan berinvestasi, berusaha, dan bekerja sehingga meningkatkan penghasilan dan kemampuan membayar pajak. Namun, apakah tingkat kriminalitas (tindak pidana) yang terjadi dalam masyarakat juga memberikan pengaruh dalam penerimaan pajak. Kondisi kesehatan masyarakat memberikan produktifitas dalam bekerja, sebaliknya permasalahan kesehatan (keluhan kesehatan) yang dialami masyarakat memberikan dampak turunnya produktifitas. Produktivitas tinggi memberikan peluang memperoleh pendapatan lebih besar dan kemampuan membayar pajak. Dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan terhadap pajak penghasilan. Secara spesifik tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan terhadap pajak penghasilan.

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang keilmuan ekonomi publik dalam kebijakan fiskal khususnya pendapatan negara dari pajak. Teori ini yang mendasari penelitian yaitu teori gaya pikul. Data yang digunakan menggunakan data sekunder pada wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis pengaruh masing-masing sektor ekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan, hubungan kriminalitas sebagai unsur keamanan terhadap ekonomi, dan pengaruh kesehatan penduduk sebagai unsur keadaan sosial terhadap fiskal. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penelitian-penelitian selanjutnya, terlebih atas variabel lain yang belum diteliti. (Isnanto, 2022)

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan solusi alternatif kepada pemerintah yang memberikan gambaran kondisi yang menjadi pendorong atau penghalang penerimaan pajak penghasilan, serta memberikan gambaran arah kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah khususnya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai badan yang merumuskan kebijakan fiskal dan DJP Kemenkeu RI sebagai pelaksana peraturan perundangan perpajakan

yang berlaku. Bagi masyarakat dengan penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan atas kondisi yang terjadi di masyarakat, kemudian diharapkan dapat menjadi pemacu masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembayaran pajak yang selanjutnya mendukung pembiayaan pembangunan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Makro

Ekonomi menurut Antonioni & Flynn (2011:9) adalah ilmu yang mendalami perilaku orang dan masyarakat untuk memilih keputusan yang dapat mereka pilih untuk menghasilkan hasil maksimal dari sumber daya terbatas. Setiap negara, setiap usaha, dan setiap orang akan menghadapi kendala dan keterbatasan. Dikemukakan Harmadi (2000:2) ilmu ekonomi didasarkan pemahaman penting diantaranya kelangkaan (*scarcity*), pilihan (*choice*), dan pengambilan keputusan (*decision making*).

Dalam Antonioni & Flynn (2011: 13) ilmu ekonomi dibagi dalam kelompok ekonomi makro dan ekonomi mikro. Makroekonomi melihat ekonomi sebagai keseluruhan organik, berkonsentrasi pada suku bunga, inflasi, pengangguran, studi ekonomi, pertumbuhan, dan bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Ekonomi mikro lebih fokus pada perorangan dan perusahaan. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana orang berperilaku dalam mengambil keputusan untuk membelanjakan uang mereka, menginvestasikan tabungannya, dan bagaimana perusahaan/ usaha perorangan agar memaksimalkan laba ketika mereka bersaing satu sama lain di pasar. Oktaviani & Novianti (2016: 4) mengemukakan variabel ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai indikator utama kinerja perekonomian suatu negara adalah produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.

Keuangan Publik

Keuangan publik menurut David (2011: 5) adalah bidang ekonomi yang mempelajari kegiatan pemerintah dan sarana alternatif pembiayaan pengeluaran pemerintah, termasuk peran pemerintah di dalam perekonomian, serta dampak terhadap penggunaan sumber daya dan kesejahteraan warga negara. Stiglitz & Jay (2015: 19–24) membagi ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif melihat kegiatan pemerintah dan konsekuensi dari berbagai kebijakan pemerintah, sedangkan ekonomi normatif melakukan evaluasi atas kebijakan alternatif yang ada.

Teori pengeluaran pemerintah oleh Peacock dan Wiseman dalam Harsasto et al. (2016: 22–23) dijelaskan pemerintah memperbesar pengeluarannya berdampak pada sisi lain mengakibatkan beban pajak yang ditanggung masyarakat bertambah besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Musgrave & Musgrave (1989: 6–11) menjelaskan walaupun dengan ukuran pajak atau pengeluaran tertentu akan memberikan dampak pada perekonomian didalam berbagai cara dan banyak

tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan kebijakan sesuai fungsinya alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi ditujukan untuk ketersediaan barang-barang yang bersifat publik. Fungsi distribusi ditujukan pemerataan penghasilan dan kekayaan untuk memastikan kesesuaian semua golongan masyarakat mendapat penghasilan yang layak. Fungsi stabilitas ditujukan pembentukan harga yang wajar, mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

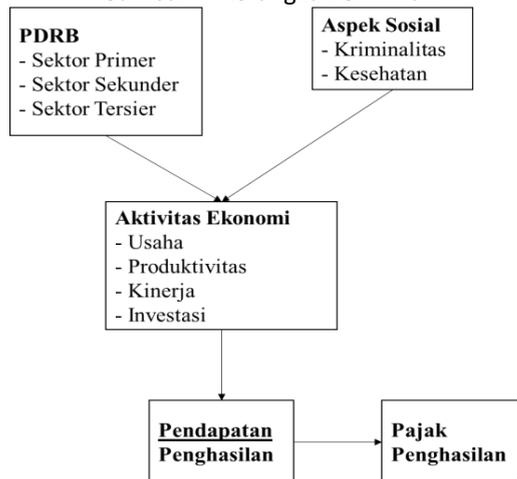
Berbagai hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait PDRB, kriminalitas, kesehatan, dan pajak penghasilan diantaranya: Kitessa & Jewaria (2018) menyebutkan PDB per kapita, bantuan luar negeri, keterbukaan perdagangan, pangsa pertanian, pangsa industri dan pangsa jasa memiliki pengaruh positif kontribusi untuk pendapatan pajak. Greoning et al. (2019) menyimpulkan PDB, sektor pertanian dalam PDB dan tarif pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penerimaan pajak perusahaan. Mispuyanti & Kristanti (2018) menemukan PDRB dan tenaga kerja memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak sedangkan inflasi, sedangkan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Temuan Pahala & Muslih (2020) berupa PDRB dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Afriyanto (2017) menyebutkan Kejahatan berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing. Prasetyo & Sukartini (2020) menjelaskan Tindak kejahatan mempengaruhi jumlah industri mikro dan kecil di perdesaan Indonesia. Bandiyono & Hazmi (2016) menjelaskan Indeks infrastruktur, Indeks institusi, dan indeks kesehatan dan pendidikan memiliki kekuatan korelasi masing- masing terhadap tax ratio tiap negara. Perbedaan kondisi ekonomi, sosial, politik, bentuk geografis, dan lain-lain menyebabkan keunikan kebutuhan dapat merubah arah regulasi pemerintah

Kerangka Pemikiran

PDRB dibagi menjadi 3 sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Aspek sosial dalam masyarakat diantaranya adalah kriminalitas dan kesehatan. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat memberikan pengaruh dalam aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Aspek permasalahan kesehatan yang dialami oleh penduduk dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 4. berikut ini:

Gambar 4. Kerangka Pemikiran



Dari Gambar 4. dapat dijelaskan bahwa PDRB dan aspek sosial dapat memberikan pengaruh pada aktivitas ekonomi dalam masyarakat maupun dunia usaha. Aktivitas ekonomi tersebut memberikan hasil berupa pendapatan maupun penghasilan. Atas pendapatan maupun penghasilan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk penerimaan pajak penghasilan.

Pengembangan Hipotesis

Semakin tinggi tingkat konsumsi dan perekonomian masyarakat berdampak menambahnya nilai PDRB, maka penerimaan pajak bertambah (Pahala & Muslih, 2020). Pada penelitian sebelumnya, belum diketahui adanya referensi/literatur atas hasil penelitian PDRB sektor primer terhadap pajak penghasilan secara langsung. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa PDRB memberikan pengaruh pada penerimaan pajak (Mispuyanti & Kristanti, 2018). Menurut Nurhabibah et al. (2021) PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 pada wajib pajak badan. Salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat adalah pajak penghasilan dengan objek pajaknya adalah penghasilan. Belum ditemukan kajian sebelumnya yang menjelaskan adanya hubungan langsung antara PDRB Sektor Primer terhadap pajak penghasilan. Disusunlah hipotesis kesatu/H1: PDRB sektor primer berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan.

PDRB suatu daerah atas berbagai sektor ekonomi yang ada mampu mendorong sektor industri semakin tinggi, kemudian berdampak penerimaan pajak atas pajak laba usaha sektor industri ikut terdorong ke atas. Kajian empiris atas hasil penelitian PDRB sektor sekunder terhadap pajak penghasilan secara langsung belum diperoleh; namun telah diperoleh kajian empiris antara PDRB, Pajak Daerah, atau Pendapatan Asli Daerah. Menurut Harahap (2020) dijelaskan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena dalam hasil penelitiannya menemukan PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan PPh final UMKM. Belum ditemukan kajian sebelumnya yang menjelaskan adanya hubungan langsung antara PDRB Sektor Sekunder terhadap pajak

penghasilan. Dirangkum hipotesis kedua/H2: PDRB sektor sekunder berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan

Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa, PDRB sebagai instrumen pengukurannya. Beberapa kajian empiris antara PDRB, dan Pendapatan Asli Daerah cukup beragam. Namun untuk penelitian PDRB sektor sekunder terhadap pajak penghasilan secara langsung belum diperoleh. PDRB merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi, yang salah satunya adalah sektor ekonomi tersier. Penelitian Muslim et al. (2019) menjelaskan bahwa penerimaan asli daerah (PAD) kota Kendari dipengaruhi PDRB, dimana sektor yang dominan dari industri perhotelan dan restoran. Penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara dipengaruhi secara positif oleh PDRB (Lumy et al., 2018). Arifin et al. (2018) mengemukakan PDRB memiliki peran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten Sumenep. Menurut Ariyani et al. (2018) terjadi hubungan positif antara PDRB dengan pendapatan asli daerah. Unsur dalam PAD adalah penerimaan pajak daerah, sedangkan jenis pajak penghasilan adalah pajak dengan objek pajaknya adalah pendapatan. Belum ditemukan kajian sebelumnya yang menjelaskan adanya hubungan langsung antara PDRB Sektor Tersier terhadap pajak penghasilan. Diajukan hipotesis ketiga/H3: PDRB sektor tersier berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan

Prasetyo & Sukartini (2020) menemukan bahwa tindak kejahatan penipuan dan pencurian berdampak pada jumlah industri mikro dan kecil. Jumlah industri mikro dan kecil diperdesaan Indonesia terhambat oleh situasi keamanan lingkungan tersebut. Menurut Haerah (2017) dijelaskan dunia pariwisata yang keamanan dan ketertibannya terganggu dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, kondisi demikian menyebabkan berkurangnya tingkat hunian hotel dan jumlah kunjungan pada restoran, akhirnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran menurun.

Bagi investor yang berinvestasi tidak hanya membutuhkan aset sumber daya alam dan tenaga kerja, ada hal penting adalah stabilitas keamanan dan perlindungan dalam berusaha. Bagi tenaga kerja dengan terjaminnya dalam bekerja, memberikan kepastian dalam memperoleh pendapatan. Kepastian berusaha dan jaminan memperoleh pendapatan dan penghasilan, memberikan peluang berperan serta membayar pajak, terlebih kondisi keamanan bebas dari tindak kriminalitas dalam jangka panjang. Disusun hipotesis keempat/H4: Kriminalitas berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan

Menurut Suryanto (2009), Hariyadi (2014), Nitayani et al. (2019), dan Fauziah et al. (2018) dijelaskan kesehatan kerja mempengaruhi secara signifikan terhadap produktivitas kerja. Bagi perusahaan, karyawan yang produktif menjamin laba

perusahaan dan keberlangsungan usaha karena terhindar dari komplain pelanggan sebagai akibat kinerja karyawan yang buruk. Bagi karyawan, hasil penilaian kinerja memberikan kesempatannya untuk mendapat reward yang berujung pada peningkatan penghasilannya. Peningkatan penghasilan karyawan memberikan dapat penambahan pajak penghasilan yang disetor oleh perusahaan.

Hasil analisis Hanoatubun (2020) dan Yamali & Putri (2020) menyimpulkan bahwa permasalahan kesehatan atas penyebaran virus *Covid-19* menyebabkan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Syamsuddin (2021) menemukan bahwa pada tahun 2020 jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar mengalami penurunan, sebagai dampak kebijakan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), pembatasan sosial (*social distancing*), serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut Jarkasih (2021) dijelaskan bahwa pandemi *covid-19* mengakibatkan sektor perpajakan di dunia dan di Indonesia menjadi menurun. Dampak pandemi *covid-19* juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan PPh Sektor Migas (Pradana et al., 2020). Dengan adanya permasalahan kesehatan yang ada dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Disusun hipotesis kelima/H5: Kesehatan berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan.

3. METODE

Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif dengan tujuan penelitian eksplanasi, yaitu mengulas hubungan sebab-akibat dari dua atau lebih fenomena. Rumusan teori yang hendak diuji diangkat dari pertanyaan-pertanyaan penelitian (Supratiknya, 2015). Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan suatu eksplanasi (keterkaitan sebab-akibat) valid atau tidak, atau menentukan diantara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing mana yang lebih valid (Siyoto & Sodik, 2015).

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi data sekunder yaitu laporan penerimaan pajak, PDRB, keamanan, dan kesehatan pada 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019. Data untuk tahun 2020 tidak masuk karena tahun tersebut terjadi bencana nasional pandemi *covid-19* sehingga data unik dan menyimpang (*outlier*). Objek dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan di 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi data sekunder. Dokumentasi data sekunder Pajak Penghasilan dari laporan penerimaan pajak dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan II. Sedangkan data sekunder berupa PDRB, jumlah tindak pidana, dan jumlah keluhan berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

Teknik analisis data merupakan alur terstruktur

dalam pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara data *time series* dan *cross section*, atau yang lebih dikenal dengan data panel (*pooled data*). Menurut Baltagi (2005: 4–7) data panel mempunyai kelebihan sebagai berikut: Mengendalikan heterogenitas individu; data yang lebih informatif, lebih variatif, lebih sedikit kolinearitas antar variabel, dan lebih bebas; mempelajari dinamika penyesuaian;

lebih mampu mengidentifikasi dibanding *cross-section* atau *time-series*; dan lainnya. Gujarati dan Porter (2009: 293) menyebutkan data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan cara yang tidak mungkin dilakukan jika kita hanya menggunakan data *cross-section* atau *time series*. Model regresi data panel penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : pajak penghasilan

α : konstanta

X_1 : PDRB sektor primer

X_2 : PDRB sektor sekunder

X_3 : PDRB sektor tersier

X_4 : tingkat kriminalitas

X_5 : kesehatan

$\beta_{(1.5)}$: koefisien regresi

ε : *error term*

t : waktu/periode

i : *cross section*/individu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan

time series. Tiga puluh lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi data *cross section* dan data *time series* adalah tahun 2015 sampai dengan 2019. Tabel dibawah ini merupakan deskripsi data yang diperoleh dan diolah dengan *software EViews*.

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

	PPh (milyar Rp.)	PDRB sektor primer (milyar Rp.)	PDRB sektor sekunder (milyar Rp.)	PDRB sektor tersier (milyar Rp.)	Kriminalitas (laporan)	Kesehatan (% keluhan kesehatan)
Mean	365,78	5.684,78	15240,55	12.754,02	343,70	33,50
Median	193,53	5.350,20	8147,89	10.181,08	254,00	32,74
Maximum	4.551,05	17.588,78	104.341,30	85.308,55	2.788,00	58,66
Minimum	54,94	132,29	2165,21	4.183,06	102,00	20,65
Std. Dev.	532,03	3.595,04	20990,16	11.301,27	336,86	6,59
Sum	64.011,97	994.836,40	2.667.097	2.231.954	60.149,00	5.862,60
Observations	175	175	175	175	175	175

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4. diketahui bahwa ketersediaan dari data-data diperoleh 175 data, sehingga data tersebut dianggap telah representatif. Komposisi PDRB sektor sekunder yang terdiri dari 4 sektor lapangan usaha, diketahui memberikan peranan terbesar dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah dibanding PDRB sektor tersier yang terdiri dari 11 sektor lapangan usaha maupun PDRB sektor primer yang terdiri 2 sektor lapangan usaha.

Jumlah laporan kejahatan tindak pidana yang diterima oleh Kepolisian Resort setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2015-2019, diketahui mean sebesar 344 laporan dibawah standar deviasi 336,86, maka datanya cukup bervariasi. Jumlah laporan tertinggi yang pernah ada sebesar 2.788 laporan, sedangkan jumlah laporan terkecil sebesar 102 laporan.

Variabel kesehatan berupa keluhan kesehatan, rata-rata sebesar 33,5% untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2015-2019. Standar deviasi sebesar 6,59% dibawah *mean* yang ada, maka sebarannya cukup bervariasi. Terdapat kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2019

pada kondisi tidak sehat dengan nilai keluhan kesehatan sebesar 58,6%.

Analisis Data

Pada bagian ini, akan menjawab masalah penelitian dan interpretasi atas hasil pengolahan data. Model di penelitian ini diubah bentuk menjadi transformasi logaritma. Gujarati dan Porter (2009: 184) menyebutkan logaritma ke basis 10 disebut logaritma umum yang dilambangkan dengan huruf *log*, sedangkan logaritma ke basis e disebut logaritma natural dilambangkan dengan *ln*. Transformasi logaritma menjadi alternatif terjadi masalah multikolinearitas (Basuki & Prawoto, 2015: 94) dan solusi apabila model menyalahi heterokedasitas (Basuki & Prawoto, 2015: 90).

Analisis Data Panel

Metode estimasi model regresi data panel yang dilakukan melalui tiga metode pendekatan, yaitu:

a. Common Effect Model (CEM)

Pendekatan model data panel ini merupakan yang paling sederhana, karena cukup menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Hasil regresi Common Effect Model (CEM) disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Regresi *Common Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	4,385544	2,057124	2,131881	0,0345
LOG X1	-0,226151	0,030490	-7,417169	0,0000
LOG X2	0,544392	0,053069	10,25829	0,0000
LOG X3	0,402051	0,104919	3,832012	0,0002
LOG X4	0,078024	0,078175	0,998070	0,3197
X5	-0,006625	0,004731	-1,400429	0,1632

Sumber: Data diolah

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Asumsi dalam model ini yaitu adanya perbedaan antar individu dapat dipenuhi dari

perbedaan intersepsinya. Hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM) disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,223283	4,065636	0,054920	0,9563
LOG X1	0,136246	0,217378	0,626773	0,5319
LOG X2	-0,695230	0,466925	-1,488953	0,1388
LOG X3	1,439262	0,436701	3,295760	0,0013
LOG X4	-0,036240	0,038326	-0,945572	0,3461
X5	-0,000955	0,001979	-0,482785	0,6300

Sumber: Data diolah

c. *Random Effect Model* (REM)

Metode estimasi data panel ini adalah menganggap variabel gangguan dimungkinkan adanya

korelasi antar waktu dan antar individu. Hasil regresi *Random Effect Model* (REM) berikut ini:

Tabel 7. Hasil Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	2,781603	3,171388	0,877093	0,3817
LOG X1	-0,241520	0,058387	-4,136510	0,0001
LOG X2	0,554673	0,107647	5,152698	0,0000
LOG X3	0,480168	0,160418	2,993220	0,0032
LOG X4	-0,047258	0,060104	-0,786264	0,4328
X5	-0,003090	0,004232	-0,730121	0,4663

Sumber: Data diolah

Uji Pemilihan Model

Pemilihan model untuk olah data panel (CEM, FEM, atau REM) yang paling tepat, dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengestimasi data panel yang paling tepat diantara model *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*. Ketentuannya, apabila nilai *probability F* $\geq 0,05$ maka H0 diterima, artinya *Common Effect Model* yang akan digunakan. Namun jika nilai *probability F* $< 0,05$, maka H1 diterima, artinya menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil uji Chow dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 8. Tabel 8. Hasil Uji Chow

Pengujian	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	41,096983	(34,135)	0,0000

Sumber: Data diolah

Hasil uji Chow pada Tabel 9. di atas

menunjukkan nilai *probability F* = 0,0000 $< 0,05$ sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel.

b. Uji Hausman

Uji Hausman untuk menentukan model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* untuk mengestimasi data panel yang paling tepat. Ketentuannya, apabila nilai *probability Chi-Square* $\geq 0,05$ maka H0 diterima, artinya *Random Effect Model* yang akan digunakan. Namun jika nilai *probability Chi-Square* $< 0,05$, maka H1 diterima, artinya menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil uji Hausman dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

Pengujian	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3,254380	5	0,6608

Sumber: Data diolah

Hasil uji *Hausman* disajikan Tabel 9. diatas menampilkan *probability Chi-Square* = 0,6608 > 0,05 sehingga H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak, artinya *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel.

c. Uji *Langrange Multiple*

Uji *Langrange Multiple* dilakukan untuk memilih model *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* untuk mengestimasi data panel yang terbaik. Pedomannya, jika probabilitas Breusch-Pagan < α (0,05) maka dipilih *random effect model*. Sedangkan jika probabilitas Breusch-Pagan > α (0,05) dipilih *common effect model*. Hasil uji *Langrange Multiple* ditampilkan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Uji *Langrange Multiple*

	Test Hipotesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	165,5991 (0,0000)	0,003574 (0,9523)	165,6026 (0,0000)

Sumber: Data diolah

Hasil uji *Langrange Multiple* pada Tabel 10. diatas menunjukkan nilai both $0,000 < \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya *Random Effect Model* tersesuai untuk estimasi data panel. Dari hasil uji *Chow*, uji *Hausman*, dan Uji *Langrange Multiple* dalam memilih model untuk olah data panel, diperoleh hasil model yang tepat pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Dengan terpilihnya metode *random effect model* dapat diasumsikan tidak terdapat korelasi atau hubungan antar galat individu dengan variabel penjelas dalam model. Inilah yang membedakan *random effect model* dengan *fixed effect model*.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menjadi syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif dalam pengujian hipotesis, namun tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier. Dalam Basuki (2014: 94) disebutkan pengujian data panel

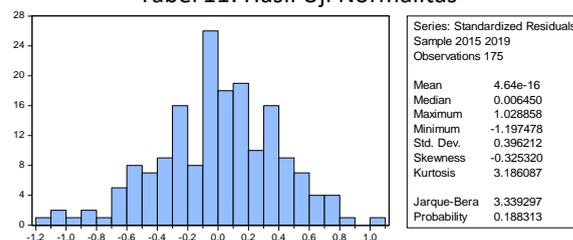
cukup diuji *multikolinearitas* dan uji *heteroskedastisitas*.

Model terpilih dalam penelitian menggunakan *Random Effect Model* dan sesuai Basuki (2014: 71) model *Random Effect Model* menghilangkan *heteroskedastisitas*. Penelitian ini cukup dengan uji *normalitas* dan uji *multikolinearitas*. Berikut hasil pengujian asumsi klasik:

a. Normalitas

Uji normalitas menurut Gujarati dan Porter (2009: 130) menjawab pertanyaan apakah variabel pengganggu tersebar secara normal. Kriteria pengujian adalah jika nilai *p-value* $\geq 0,05$ maka model dinyatakan terdistribusi normal, namun bila Jika nilai *p-value* < 0,05 maka model dinyatakan terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas ditampilkan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah

Dari Tabel 11. terlihat *probability (p-value)* sebesar 0,188313 > 0,05 disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. *Multikolinieritas*

Uji *multikolinieritas* dilakukan untuk menjawab apakah dalam model regresi apakah diketahui adanya hubungan yang sempurna antar variabel independen. Kriteria pengujian jika koefisien korelasi antar variabel bebas > 0,8 disimpulkan model terjadi *multikolinearitas*. Bila koefisien korelasi $\leq 0,8$ maka model terbebas *multikolinearitas*. Hasil uji *multikolinieritas* ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Hasil Uji *multikolinieritas*

	LOG X1	LOG X2	LOG X3	LOG X4	X5
LOG X ₁	1,000000	0,178920	0,163720	-0,186697	0,082252
LOG X ₂	0,178920	1,000000	0,780146	0,541417	0,032128
LOG X ₃	0,163720	0,780146	1,000000	0,659371	0,080420
LOG X ₄	-0,186697	0,541417	0,659371	1,000000	-0,129993
X ₅	0,082252	0,032128	0,080420	-0,129993	1,000000

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 12. diketahui semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi masalah *multikolinieritas* atau tidak terdapat korelasi antara variabel independen.

Pengujian asumsi klasik ini, cukup dengan uji normalitas dan uji *multikolinearitas*, dengan hasil tidak ditemukan masalah distribusi dan terbebas masalah *multikolinearitas*, maka penelitian ini memenuhi syarat

untuk penelitian kualitatif.

2. Uji Kelayakan Model

Pada bagian ini, akan dijelaskan hasil analisis sebagai jawaban rumusan masalah penelitian yang diajukan. Diketahui pada uji pemilihan model sebelumnya (uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Langrange Multiple*) untuk pemilihan model terbaik untuk olah data panel ini, diperoleh hasil model terpilih adalah *Random Effect Model*. Hasil model analisis data panel disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Model Analisis Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	2,781603	3,171388	0,877093	0,3817
LOG X1	-0,241520	0,058387	-4,136510	0,0001
LOG X2	0,554673	0,107647	5,152698	0,0000
LOG X3	0,480168	0,160418	2,993220	0,0032
LOG X4	-0,047258	0,060104	-0,786264	0,4328
X5	-0,003090	0,004232	-0,730121	0,4663

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 13, hasil estimasi model analisis data panel dapat diestimasi dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log } Y = 2,781603 - 0,241520(\text{Log } X_1) + 0,554673(\text{Log } X_2) + 0,480168(\text{Log } X_3) - 0,047258(\text{Log } X_4) - 0,003090(X_5)$$

a. Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) sebagai alat ukur sejauh apa kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen, serta berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil Koefisien Determinasi R² dalam penelitian ini diperoleh *R-squared* sebesar 0,490521, maka diketahui bahwa variabel PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan memberikan pengaruh sebesar 49.05% pada variabel PPh. Sedangkan sisanya 50,95% merupakan kontribusi dari variabel lainnya.

b. Uji Signifikansi Uji F

Uji F dilakukan dalam pengujian apakah semua variabel independen dapat berpengaruh pengaruh secara bersama-sama kepada variabel dependen. Hasil uji Signifikansi bersama-sama dalam penelitian ini diperoleh *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000000.

Selanjutnya dilakukan penghitungan dan penyandingan dengan *F-tabel* untuk menguji apakah semua variabel independen dalam model memberikan pengaruh secara bersama-sama. Diketahui n= jumlah observasi sebesar 175, k= jumlah variable independen (X) sebesar 5, dan i= jumlah cross section (Kabupaten/kota) sebesar 35. Maka, $df_1 = (i-1) = 35-1 = 34$ sedangkan $df_2 = (n-(k+i)) = (175-(5+35)) = 135$, diperoleh *f-tabel* (untuk prob: 0,05 ; $df_1: 34$; dan $df_2: 135$) sebesar 1,51.

Diperoleh *F-hitung* sebesar 32,54231 > 1,51 (*f-tabel*) dan *Prob* 0,000000 < 0,05, maka variable independen (X) secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Maka, variabel PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel PPh.

c. Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji kemampuan pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. Pedoman yang digunakan adalah apabila *Ho* diterima jika *p-value* ≥ 0,05 dan *Ha* diterima jika *p-value* < 0,05. Hasil estimasinya ditampilkan dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,781603	3,171388	0,877093	0,3817
LOG X1	-0,241520	0,058387	-4,136510	0,0001
LOG X2	0,554673	0,107647	5,152698	0,0000
LOG X3	0,480168	0,160418	2,993220	0,0032
LOG X4	-0,047258	0,060104	-0,786264	0,4328
X5	-0,003090	0,004232	-0,730121	0,4663

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 14. perlu dilakukan penghitungan dan penyandingan dengan *F-tabel* untuk menguji apakah variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. PDRB sektor primer (X₁) diketahui *p-value* = 0,0001 < 0,05 maka *Ho* diterima, sehingga PDRB sektor primer berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan
- b. PDRB sektor sekunder (X₂) *p-value* = 0,0000 < 0,05 maka *Ha* diterima, sehingga PDRB sektor sekunder berpengaruh positif signifikan terhadap pajak

- penghasilan
- c. PDRB sektor tersier (X₃) diketahui *p-value* = 0,0032 < 0,05 maka *Ho* diterima, sehingga PDRB sektor tersier berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan
- d. Kriminalitas (X₄) diketahui *p-value* = 0,4328 > 0,05 maka *Ho* diterima, sehingga kriminalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan
- e. Kesehatan (X₅) diketahui *p-value* = 0,4663 > 0,05 maka *Ho* diterima, sehingga kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan

Pembahasan

Hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa PDRB sektor primer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Hasil penelitian ini tidak searah dengan Mispriyanti & Kristanti (2018) dan Nurhabibah et al. (2021) menjelaskan bahwa PDRB memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sesuai dengan Basirat et al. (2014) mengemukakan nilai tambah sektor pertanian memiliki hubungan negatif signifikan dengan penerimaan pajak total.

Dalam buku Hasil Survei Pertanian antar Sensus (Sutas) 2018 oleh BPS RI (2018: 50–54) disebutkan jumlah rumah tangga dengan kegiatan usaha pertanian sebagai pengguna lahan di Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 4.432.996, sedangkan luas lahan yang dikuasai < 0,5 Ha oleh petani gurem sebesar 3.618.041, maka dapat disimpulkan pertanian di Jawa Tengah didominasi petani gurem sebesar 81,62%. Disampaikan oleh Yon Aرسال, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu dalam Prima (2019) menyampaikan semakin besar kontribusi pertanian semakin rendah tax ratio-nya, karena pekerjaannya memperoleh penghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi pegawai/karyawan penghitungan dan pemotongan pajak dilakukan pemberi kerja (Isnanto, 2014a: 9). Pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak diwajibkan bagi yang sesuai dengan ketentuan pajak (Isnanto, 2014b: 9). Hasil tambang yang terindikasi dari harga minyak mentah tidak mempengaruhi pajak penghasilan (Isnanto et al., 2021).

Hasil pengujian dari hipotesis kedua diperoleh hasil PDRB sektor sekunder memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harahap (2020), Aji (2021), dan Lisnawati (2020) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah (2021) PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 memberikan kontribusi 34,4% dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Press release Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dalam Prass (2021), Slamet Sutantyo menjelaskan bahwa PDRB wilayah provinsi Jawa Tengah secara sektoral didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 37,49% dari total realisasi penerimaan neto. Selain itu, perluasan usaha dengan membuka kegiatan usaha di tempat lain, diwajibkan untuk pendaftaran NPWP baru di lokasi baru. Kewajiban ber-NPWP lokasi memberikan dampak adanya pemotongan/pemungutan/pembayaran pajak di lokasi terdaftar. Bagi pemerintah daerah adanya NPWP lokasi dapat meningkatkan bagi hasil pajak pusat kepada daerah.

Hasil pengujian dari hipotesis ketiga menunjukkan bahwa PDRB sektor tersier dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, komunikasi dan/atau pengangkutan, keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan serta jasa lainnya; berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Hasil pengujian sesuai dengan hipotesis ketiga bahwa PDRB sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Muslim et al. (2019), Lummy et al. (2018), Arifin et al. (2018), Victory & Hayati (2020), dan Ariyani et al. (2018) yang mendapatkan hasil penelitian jika PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah dalam bentuk pajak atau penerimaan asli daerah.

Pengujian atas hipotesis keempat diketahui jika variabel kriminalitas dengan indikator jumlah tindak pidana, ternyata terhadap pajak penghasilan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Risiko penduduk terkena kejahatan (*resident risk of crime*) dalam BPS RI (2021b) adalah angka kejahatan per 100.000 penduduk. Dalam publikasi BPS RI (2020) disebutkan risiko penduduk terkena kejahatan (*resident risk of crime*) tahun 2019 adalah terendah dari 34 provinsi di Indonesia yaitu 30 penduduk, sedangkan risiko penduduk terkena kejahatan Indonesia adalah 103 penduduk, dan terbesar ditempati Papua Barat sebesar 325 penduduk. Maka, dapat diartikan risiko terkena kejahatan oleh penduduk Jawa Tengah adalah 30 penduduk per 100.000 penduduk Jawa Tengah. Tingginya jumlah tindak pidana di Jawa Tengah tidak diikuti dengan rasio risiko terkena kejahatan kepada penduduk Jawa Tengah, hal tersebut dapat memberi gambaran kondisi kriminalitas Jawa Tengah belum memberikan ancaman besar kepada seluruh penduduknya.

Hasil pengujian hipotesis kelima memperoleh hasil bahwa variabel kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan. Hasil tidak sejalan dengan Saturwa et al. (2021) yang menunjukkan permasalahan kesehatan memberikan dampak negatif terhadap kinerja penjualan. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2011 Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberi per jam berkewajiban mengikutkan dirinya dan para pekerja ke program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut memberikan kepastian dan pertanggungjawaban kepada pekerja atas keadaan sakit, kecelakaan kerja, bahkan meninggal dunia oleh BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan. Biaya atas perawatan dan santunan kepada karyawan tidak dibebankan kepada perusahaan, walaupun perusahaan masih dapat membebaskan biaya tersebut dalam bentuk natura. Perusahaan dapat memperhitungkan biaya premi asuransi ketenagakerjaan dan/atau kesehatan secara rutin sebagai fasilitas (tunjangan) dari perusahaan maupun dibebankan kepada karyawan. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengatur kondisi keuangan perusahaan tetap mendapatkan laba/keuntungan usaha yang stabil atas risiko kesehatan dan keselamatan kerja pegawai.

Produktifitas usaha akan terdampak dengan

kondisi kekosongan karyawan karena sakit, kecelakaan kerja, maupun meninggal dunia. Namun kondisi tersebut dapat diantisipasi dengan pergantian shift jam kerja maupun tambahan jam lembur bagi karyawan pengganti. Penggantian shift jam kerja dan lembur memastikan produksi/pelayanan tetap berjalan. Bagi perusahaan meningkatkan biaya lembur karyawan, namun produktifitas tetap berjalan.

5. PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini telah menjawab permasalahan yaitu PDRB sektor primer memberikan pengaruh negatif dan signifikan kepada pajak penghasilan. Karena sektor ekonomi primer didominasi usaha informal dan berpenghasilan dibawah PTKP, tetap memberikan hasil produk barang baku dan jasa, namun sedikit memberikan penerimaan PPh. PDRB sektor sekunder diketahui memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan. Sektor ekonomi sekunder mengolah barang baku menjadi bernilai lebih tinggi di Jawa Tengah cukup dominan, sehingga berperan besar dalam penerimaan PPh atas laba usaha perusahaan maupun penghasilan orang pribadi. PDRB sektor tersier memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Sektor ekonomi tersier sebagai pendukung dan katalisator kegiatan ekonomi sektor primer dan sekunder, sehingga karena Bergeraknya sektor lain berdampak kepada pada pembayaran PPh atas penghasilan yang diperoleh perusahaan swasta maupun karyawannya.

Kriminalitas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Bagi kegiatan usaha oleh badan usaha/perorangan yang berdampak langsung sebagai korban kriminalitas akan berdampak pada laba usaha serta pembayaran PPhnya. Namun, bagi usaha/perorangan selain yang berdampak kriminalitas, kegiatan operasional usaha tetap berjalan sebagai mana biasanya. Kesehatan tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Kondisi kesehatan karyawan yang mengganggu operasional usaha dapat diantisipasi dengan pengaturan jadwal operasional atau pergantian shift. Tanggung jawab perusahaan atas kecelakaan kerja, rawat jalan/inap, dan meninggal dunia karyawannya telah ditanggung dengan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Saran

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang relevan berdasarkan hasil penelitian diantaranya yaitu sektor ekonomi sekunder diketahui dominan dan berpengaruh signifikan terhadap PPh di Provinsi Jawa Tengah maka sektor ini perlu dilakukandukungan usaha agar stabil dan dukungan kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha yang nyata atas peranan pemerintah adalah kemudahan registrasi (pendaftaran) usaha dan kemudahan pelaksanaan

kewajiban usaha pasca berjalan usaha. Kemudahan pelaksanaan kewajiban setelah usaha misalnya kemudahan pembayaran pajak, kemudahan memperoleh layanan publik (misal: perpanjangan izin usaha, layanan parkir, IMB, izin kegiatan/keramaian, dll), dan kemudahan ketika mendapatkan bantuan ketika musibah/kerugian (misal: kebakaran, banjir, dampak tindak pidana (pencurian/perampokan), dll)

Untuk sektor ekonomi tersier karena didominasi usahawan yang terdaftar dari luar kota dapat ditingkatkan penerimaan pajaknya dari pemotongan/pemungutan PPh dan PPN. Lain halatas sektor ekonomi primer yang terdiri dari pertanian dan pertambahan berpengaruh negatif signifikan terhadap PPh, dapat dikembangkan penerimaan pajak dari pengolahan barang dari hasil sektor primer. Peranan pemerintah dan DPR dapat berupa harmonisasi peraturan perundangan satu dengan perundangan yang lainnya. Harmonisasi antara regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu dibenahi agar tidak saling bertolak belakang. Peningkatan kapasitas kepada aparatur pelayanan dan teknis agar bekerja efektif, efisien, dan pelayanan prima.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian menggunakan indikator laporan tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian resort, tidak diperinci detil jenis tindak pidananya, namun adanya pelaporan tersebut mengindikasikan kemungkinan dampak pelanggaran hukum yang berdampak pada memperoleh penghasilan.

Indikator variabel kesehatan menggunakan persentase keluhan kesehatan, sedangkan penghitungan mendasar kepada seluruh penduduk, tidak memperhitungkan penduduk yang berpenghasilan dibawah PTKP maupun belum memiliki penghasilan.

Penelitian selanjutnya dapat diperluas pada variabel jenis pajak pusat lainnya, seperti: pajak pertambahan nilai; pajak penjualan barang mewah; pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan perkebunan pertambangan; dan bea meterai. Selain itu, indikator penerimaan pajak penghasilan dapat diperinci, misal jenis penerimaan bruto, penerimaan neto, penerimaan rutin, penerimaan menurut jenis pajak penghasilan, masa/tahun pajak, dan lainnya.

Penelitian berikutnya dapat menggali variabel PDRB masing-masing lapangan usaha/sektor ekonomi. Dapat pula dilakukan kajian terhadap pengaruh jenis pajak selain PPh terhadap lapangan usaha, karena perbedaan objek pajak bisa berbeda pula lapangan usaha/sektor ekonomi yang mempengaruhinya.

Karakteristik geografis, kondisi ekonomi, infrastruktur, budaya, sosial, ideologi, politik, budaya, dan pertahanan; atau variabel pada turunannya seperti lingkungan, pendidikan, agama, kemiskinan, dan sosial lainnya dapat menjadi penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Afriyanto, M. M. (2017). The impact of crime on foreign direct investment in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 189–198. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art8>
- Aji, F. B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 10, 1–12. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/29995>
- Antonioni, P., & Flynn, S. M. (2011). *Economics for Dummies* (2nd ed.). West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.
- Arifin, M., Rofik, M., & Andrianingsih, V. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2011. *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi*, 8(1), 42–50. Diambil dari <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FEb/article/view/467>
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 95–109. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/8121>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2019*. Semarang: CV. Surya Lestari. Diambil dari <https://jateng.bps.go.id/publication/2019/08/16/fcb9efa7796cdbc491325688/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2019.html>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3 ed.). West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bandiyono, A., & Hazmi, R. Al. (2016). Kualitas Pelayanan Institusi, Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan, Serta Kepatuhan Pajak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 1–98. Diambil dari <https://jpk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/7743/6727>
- Basirat, M., Aboodi, F., & Ahangari, A. (2014). Analyzing the Effect of Economic Variables on Total Tax Revenues in Iran. *Asian Economic and Financial Review*, 4(6), 755–767. Diambil dari [http://www.aessweb.com/pdf-files/aefr-2014-4\(6\)-755-767.pdf](http://www.aessweb.com/pdf-files/aefr-2014-4(6)-755-767.pdf)
- Basuki, A. T. (2014). *Buku Pratikum EvIEWS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). [Seri 2010] PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010 - 2020. Diambil 27 November 2021, dari <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/11/06/1683/-seri-2010-pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010---2020.html>
- BPS RI. (2018). *Hasil Survei Pertanian antar Sensus (Sutas) 2018*. Jakarta: BPS RI. Diambil dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/01/02/c7cb1c0a1db444e2cc726708/hasil-survei-pertanian-antar-sensus--sutas--2018.html>
- BPS RI. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Jakarta: BPS RI. Diambil dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/30/b792420b4ec3849e5ed29ea3/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2015-2019.html>
- BPS RI. (2021a). Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir (Persen), 2010-2021. Diambil 9 April 2021, dari <https://www.bps.go.id/indicator/30/222/1/persentase-penduduk-yang-mempunyai-keluhan-kesehatan-selama-sebulan-terakhir.html>
- BPS RI. (2021b). Sistem Informasi Rujukan Statistik - Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate). Diambil 26 Mei 2021, dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7885>
- David, H. N. (2011). *Public Finance a Contemporary Application of Theory to Policy*. Mason: Joe Sabatino.
- Fauziyah, A., Djaelani, A. K., & Slamet, A. R. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada karyawan bagian produksi PT. Berlina Tbk Pandaan). *e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 2(8), 60–73. Diambil dari <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1208>
- Greoning, E., Zivanomoyo, J., & Tsaurai, K. (2019). Business Administration and Business Economic. *Business Administration and Business Economics : Oeconomica*, 15(5), 7–37. Diambil dari <https://www.proquest.com/docview/2282684176/fulltextPDF/C312349FB0DD4E3DPQ/3?accountid=37509#>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.
- Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico*, 17(9), 1. Diambil dari <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/979>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(1), 146–153. Diambil dari <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/179>

- Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Makroekonomi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 400. <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i2.013>
- Harahap, W. S. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20, 74–81. Diambil dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4954>
- Hariyadi, H. (2014). Analisa Keterkaitan Antara Lingkungan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Produktivitas Kerja dengan Metode Structural Equation Modeling (Studi Kasus : PT. Media Karya Sentosa Gresik). *Matrik*, XV(1), 55–65. <https://doi.org/10.30587/matrik.v15i1.xxx>
- Harmadi, S. H. B. (2000). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Harsasto, P., Widayati, W., Astuti, P., Martini, R., & Retno, N. (2016). *Ekonomi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Institute for Economics & Peace. (2018). *Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World*. Sydney. Diambil dari <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global-Peace-Index-2018-2.pdf>
- Isnanto, A. (2014a). *Lapor SPT Tahunan PPh OP melalui internet* (1 ed.). Banjarnegara: CV. Gunung Perahu.
- Isnanto, A. (2014b). *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan* (I). Yogyakarta: Bahari Press.
- Isnanto, A. (2022). *Pengaruh PDRB, Kriminalitas, dan Kesehatan terhadap Pajak Penghasilan di Provinsi Jawa Tengah 2015-2019*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Diambil dari <http://repository.unsoed.ac.id/15691/>
- Isnanto, A., Istiqomah, & Suharno. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2(1), 832–836. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i1.3907>
- Jarkasih, A. (2021). Presepsi Warga terhadap Covid 19. *Transformasi Manageria*, 1(1), 1–12. Diambil dari <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/manageria/article/view/268>
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2020*. Bank Indonesia. Semarang. Diambil dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jateng/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Tengah--Mei-2020.aspx>
- Kartikasari, R. D., & Swasto, B. (2017). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Bagian Produksi PT. Surya Asbes Cement Group Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 44(1), 89–95. Diambil dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1731/2111>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku Informasi APBN 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kitessa, D. T., & Jewaria, T. (2018). Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis. *Journal of Economics and International Finance*, 10(11), 134–155. <https://doi.org/10.5897/jEIF2018.0924>
- Lisnawati, L. (2020). Pengaruh Faktor Demografis dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Pbb-P2) dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Daerah Di 18 Kabupaten Di Jawa Barat. *Logistic and Accounting Development Journal*, 1(2), 108–219. Diambil dari <https://ejournal.poltekpos.ac.id/index.php/jurnal-land/article/view/713>
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.5. 2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(5), 1–18. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/32723>
- Mispiyanti, & Kristanti, I. N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.32639/jiak.v7i1.159>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. Economists' Voice (5 ed.). Singapore: McGraw-Hill Higher Education.
- Muslim, C., Mallongi, S., & Rahman, Z. (2019). Pengaruh PDRB , Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia*, 2(3), 57–65. Diambil dari <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/download/220/141/>
- Nitayani, K. D., Tripalupi, L. E., & Haris, I. A. (2019). Pengaruh Kedisiplinan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Semen Tonasa Gerokgak Jalan Pelabuhan Celukan Bawang, Bali. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(2), 207–216. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20034>
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset*

- Akuntansi dan Bisnis Vol, 21(1), 54–62.*
<https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6756>
- Oktaviani, R., & Novianti, T. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Oktiani, N., Sabariah, E., Saridawati, S., & Caroline, P. (2019). Implementasi Penerapan Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan Terhadap Peningkatan Produktifitas Kerja. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, 3(2), 255–262.*
<https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i2.6472>
- Pahala, A. A., & Muslih, M. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *e-Proceeding of Management, 7(2), 3083–3090.* Diambil dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversit y.ac.id/index.php/management/article/view/13362>
- Pichon-Riviere, A., Alcaraz, A., Palacios, A., Rodríguez, B., Reynales-Shigematsu, L. M., Pinto, M., ... Bardach, A. (2020). The health and economic burden of smoking in 12 Latin American countries and the potential effect of increasing tobacco taxes: an economic modelling study. *The Lancet Global Health, 8(10), e1282–e1294.*
[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30311-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30311-9)
- Pinto, M., Bardach, A., Palacios, A., Biz, A., Alcaraz, A., Rodriguez, B., ... Pichon-Riviere, A. (2019). Burden of smoking in Brazil and potential benefit of increasing taxes on cigarettes for the economy and for reducing morbidity and mortality. *Cadernos de Saude Publica, 35(8), 1–17.*
<https://doi.org/10.1590/0102-311X00129118>
- Pradana, A., Wulandari, A. D., Noorwidhi, B. F., & Sitinjak, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Nasional dan Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi. *Orphanet Journal of Rare Diseases, 2(12), 998–1012.* Diambil dari <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/815>
- Prasetyo, M. D., & Sukartini, N. M. (2020). Kaitan Antara Kondisi Keamanan Lingkungan terhadap Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Huaniora, 4(6), 223–240.* Diambil dari <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/9918>
- Prass, A. B. (2021). Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng II Capai 39,20 Persen Dari target Rp 12,474 T – Laman 2 – KRJOGJA. Diambil 28 November 2021, dari <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/realisasi-penerimaan-pajak-kanwil-djp-jateng-ii-capai-3920-persen-dari-target-rp-12474-t/2/>
- Prima, B. (2019). Dominasi sektor pertanian sebabkan tax ratio masih rendah. Diambil 19 Mei 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/dominasi-sektor-pertanian-sebabkan-tax-ratio-masih-rendah>
- Putra, R. E., & Prasetya, A. (2018). Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 56(2), 153–159.* Diambil dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2396>
- Ridha, M. R., & Parwanto, N. (2020). The Effect of Foreign Direct Investment, Human Development and Macroeconomic Condition on Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics, 8(2), 46–54.*
<https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2020.008.02.5>
- Saputro, G. E., & Meirinaldi. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi, 21(3), 237–253.* Diambil dari <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/757>
- Saturwa, H. N., Suharno, & Ahmad, A. A. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on MSMEs. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 24(1), 65–82.*
<https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan 1). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Stiglitz, J. E., & Jay, R. K. (2015). *Economics of the Public Sector. Statistical Field Theor* (fourth). New York/London: W.W. Norton & Company.
- Subagyo, W. H., & Melliza, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. *Economicus, 13(1), 23–33.*
<https://doi.org/10.47860/economicus.v13i1.162>
- Supratiknya, A. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Suryanto. (2009). Analisis Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja Berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja dengan Metode Structural Equation Modeling (Studi Kasus : PT. Media Karya Sentosa Gresik). *Matrik : Jurnal Manajemen dan Teknik Industri Produksi, 30–40.* Diambil dari <http://journal.umg.ac.id/index.php/matriks/article/view/480>
- Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA), 1(1), 5–14.* Diambil dari <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/jba/article/view/2676>
- Victory, D., & Hayati, B. (2020). Analisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah kamar terjual, pdrb perkapita, dan inflasi terhadap realisasi penerimaan pajak hotel kota semarang tahun

2010-2017. *Diponegoro Journal of Economics*,
9(4), 1–8. Diambil dari [http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/jme](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme)

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19
Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal
of Economics and Business*, 4(2), 384–388.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>